

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR CAMAT
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR****SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat dan tugas untuk menyelesaikan pendidikan S1
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

PATMA DWI JAYANTI
NIM. 12070520695

**PROGRAM S1
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Patma Dwi Jayanti
 : 12070520695
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Kantor Camat Tambang
 Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

Mengetahui

KETUA PRODI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: PATMA DWI JAYANTI
 : 12070520695
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : VIII (DELAPAN)
 : IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR
 CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING**

Weni Puji Hastuti, S.Sos M.KP
 NIP. 19810505 200604 2 006

WAKIL DEKAN I
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP.19790101 200710 1 003

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

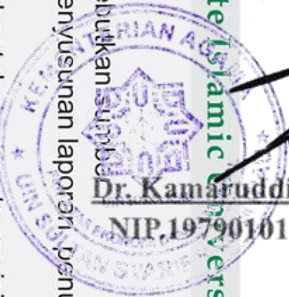
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA
 NIM
 FAKULTAS
 SEMESTER
 JUDUL SKRIPSI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Patma Dwi Jayanti
 : 12070520695
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar
 : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Dr. Sitti Rahmah, M. Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Mashari, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M. Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Patma Dwi Jayanti
 NIM : 12070520695
 Tempat/Tgl. Lahir : Tj. Beringin / 06 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
 7A77FALX127080627

Patma Dwi Jayanti
 Patma Dwi Jayanti
 NIM : 12070520695

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

PATMA DWI JAYANTI
NIM: 12070520695

Good governance dalam kerangka program merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan fungsi administratif umum tingkat kecamatan dalam mengelola dan melayani masyarakat. Hal ini membuat *good governance* harus diterapkan didalam pemerintahan kecamatan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menyelenggarakan yang efektif dan efisien ditingkat ini. Oleh sebab itu perlu diteliti bagaimana implementasi prinsip *good governance* di Kantor Camat Tambang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi prinsip *good governance* di Kantor Camat Tambang serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat implementasi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data didapatkan dari wawancara mendalam dengan pegawai Kantor Camat Tambang dan masyarakat yang berada di Kecamatan Tambang. Penelitian dilakukan di Kantor Camat Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa prinsip *good governance* sudah diimplementasikan di Kantor Camat Tambang. Akan tetapi belum semua prinsip *good governance* diimplementasikan dengan optimal. Sehingga *good governance* belum terlaksana, hal ini dilihat dari ditemukannya keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada. Adapun faktor penghambat yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, ketidakdisiplinan pegawai dan sarana teknologi yang belum memadai. Kesimpulannya adalah implementasi prinsip *good governance* sudah diterapkan akan tetapi belum dijalankan secara optimal karena adanya faktor yang menghambat untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan sehingga *good governance* dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Good Governance, Implementasi, Kantor Camat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tak lupa juga penulis ucapkan Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulis Skripsi ***“Implementasi Prinsip Good Governance Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”*** bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bahwasanya dalam penulisan Proposal skripsi ini tidak lepas dari kesalahan, dan keraguan serta kekhilafan, oleh karena itu penulis mohon maaf kepada Allah SWT, Dan penulis mohon maaf kepada pembaca penulis.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan bimbingan selama berlangsungnya skripsi, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, ayahanda Arpan Indra dan Ibunda Nur'anismah yang selalu membimbing, memberi kasih sayang dan mendoakan penulis serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku wakil ketua jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi pembimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak dan para staf pemerintahan Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin dan arahan kepada penulis.
9. Teruntuk kakak Sisri Indriyani dan adik Tata, Terimakasih telah berpartisipasi dan membantu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman jurusan Administrasi Negara kelas F dengan Angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat, dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat

menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Aamiin ya rabbal alamin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 / 06 /2024

Penulis

Patma Dwi Jayanti
NIM. 12070520695

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	12
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Teori Implementasi	15
2.2 <i>Good Governance</i>	16
2.3 Pandangan Islam terhadap <i>Good Governance</i>	19
2.4 Pelayanan Publik	22
2.5 Kedisiplinan.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Definisi Konsep	27
2.8 Konsep Operasional.....	28
2.9 Kerangka Berfikir	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi dan Waktu penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik pengumpulan data.....	32
3.5 Subjek Penelitian	33
3.6 Teknik Analisis Data	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	36
GAMBARAN UMUM	36
4.1 Sejarah Kecamatan	36
4.2 Visi dan Misi Kecamatan	39
4.3 Tugas dan Fungsi Kecamatan	40
4.4 Struktur Organisasi Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar	54
4.5 Nama Pegawai	55
BAB V	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Hasil Penelitian	57
5.1.1 Gambaran Objek Peneliti.....	58
5.1.1.1 Deskripsi Informan Penelitian	58
5.1.2 Analisa Deskripsi Hasil Penelitian	59
5.1.2.1 Hasil Wawancara Informan (Pegawai).....	59
5.1.2.2 Hasil Wawancara informan (Masyarakat)	71
5.2 Implemetasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.....	86
5.3 Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar	91
BAB VI	92
PENUTUP	92
1 Kesimpulan.....	92
2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era globalisasi dan tuntutan sosial yang semakin kompleks, kualitas pelayanan publik daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Mengembangkan *good governance* atau pemerintahan yang baik telah menjadi fokus penting reformasi sektor publik di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab, menjadi landasan dalam membangun sistem tata kelola yang efektif dan dapat dipercaya.

Good governance ini menjadi acuan untuk mencari cara memperbaiki birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Good governance dalam kerangka program pada hakikatnya merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penerapan *good governance* diperlukan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Good governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service yang disebut governance (pemerintahan, pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut “good governance” (tata pemerintahan yang baik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Administrasi Negara menyatakan Good governance adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tangguh dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga “sinergi” interaksi yang konstruktif diantar domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam pengertiannya istilah governance tidak sama dengan government. Konsep government merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan (Negara dan Pemerintah). Namun konsep governance melibatkan tidak hanya berlaku pada pemerintah dan negara, namun juga mencakup sektor swasta dan juga masyarakat lokal, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Good Governance dapat diartikan sebagai kegiatan berbasis nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi Masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ranah *Good Governance* tidak hanya terbatas pada negara melalui birokrasi negara saja, Namun juga pada ranah masyarakat sipil yang diwakili oleh organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Karena Good Governance seharusnya ditujukan tidak hanya kepada para pemimpin negara atau pemerintah saja, namun juga kepada Masyarakat dan pemerintah yang secara bersemangat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Tahir, 2022).

Dalam PPRI No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara urusan administrasi publik. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pelaksana perangkat daerah, camat menjalankan tugas dari bupati/wali kota yang dilimpahkan dan dalam penyelenggara urusan pemerintahan umum, Dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga diperlukan pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kantor camat sebagai unit pemerintahan di tingkat daerah kecamatan mempunyai peranan strategis dalam mengelola dan melayani masyarakat setempat. Sebagai unit administrasi terkemuka, kinerja Kantor Camat secara langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan prinsip *good governance* yang dapat memberikan hasil yang efektif pada penyelenggaraan pemerintah di tingkat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di Indonesia telah menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* di semua tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *good governance* di kantor camat sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat lokal.

Salah satu badan daerah yang harus melaksakan prinsip-prinsip *good governance* adalah kantor camat. Kantor Tambang merupakan salah satu lembaga negara yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyiapan berkas yang diperlukan, seperti pembuatan surat KTP, akta kelahiran, surat tanah, surat pindah, legalisasi dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun konsep *good governance* telah menjadi landasan penting, penerapannya di kantor camat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari ketidaktahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip *good governance* hingga hambatan administratif dan budaya di dalam organisasi, Permasalahan tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam dan Solusi yang konkrit.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan implementasi prinsip *good governance* di kantor camat. Pemerintahan Kecamatan harus terlaksana dengan baik sehingga dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan di daerah. Sebab pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu aspek yang dianggap penting untuk meningkatkan dan megembangkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan.

Adapun desa – desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tambang yaitu dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar nama dan jumlah Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	Nama Desa
1	Kuapan
2	Aursati
3	Tambang
4	Padang Luas
5	Gobah
6	Terantang
7	Rimbo Panjang
8	Kualu
9	Teluk Kenidai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10	Kemang Indah
11	Parit Indah
12	Sungai Pinang
13	Kualu Nenas
14	Tarai Bangun
15	Palung Raya
16	Pulau Permai
17	Balam Jaya

Sumber data : Kantor Camat Tambang

Kantor Camat Tambang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, surat tanah, surat pindah, legalisir dan lain-lainnya.

Berikut pelayanan administrasi yang tersedia di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar yaitu:

Tabel 1.2 Jenis dan Bentuk-bentuk Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Tambang

No	Jenis Pelayanan	Bentuk Pelayanan
1	Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kartu Identitas Penduduk (KTP) - Membuat Kartu Keluarga - Pembuatan Akta Kelahiran - Pembuatan Surat Kematian
2	Surat Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - izin mendirikan bangunan (IMB) - Surat izin tempat usaha (SITU)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Surat pengantar keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan tanah (SKT), surat Ganti Kerugian (SKGR), Jual Beli, keterangan hibah - Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) - Surat keterangan pindah
4	Surat-surat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi - Legalisir

Sumber: Kantor Camat Tambang, (Perda Kab. Kampar no. 21 tahun 2003)

Sehubungan dengan permasalahan penelitian tersebut, berikut penulis memaparkan beberapa prosedur pelayanan di Kantor Camat Tambang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

NO	Kegiatan	Petugas	Keterangan	Waktu
1	Pengurusan SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin), Legalisir, surat Pindah	Kasi Kessos	Penyerahan fotocopy KK & KTP ke petugas bagian pelayanan, setelah itu petugas menyerahkan kebagian umum untuk pencetakan surat, tahap akhir Tanda Tangan kasi Kessos	1 Hari
2	Pembuatan Surat keterangan waris, surat	Kasi Pemerintahan	Penyerahan persyaratan kebagian	3 hari



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	kuasa waris, permohonan ukur tanah, surat pelepasan hak atas tanah, Surat persetujuan pembagian hak bersama. (SKT) - SKGR -SKHT - SKRPT		umum, setelah itu persyarakatan akan di proses di Kasi Pemerintahan	
3.	Pindah penduduk pindah datang, pindah keluar	Bagian Pelayanan	Penyerahan Persyaratan bagian pelayanan, penyerahan berkas kebagian umum, pencetakan surat pindah	3 Hari

Sumber data: Kantor Camat Tambang

Dari tabel Standar Prosedur Operasional (SOP) dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan yang berada di kantor camat Tambang Kabupaten Kampar yang sudah dipaparkan oleh peneliti, kegiatan dan rentan waktu yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan dalam pengurusan administrasi atau surat menyurat sudah tertera pada sop yang ada, akan tetapi proses pengerjaan oleh pihak pegawai kantor camatnya sendiri itu melebihi dari waktu yang sudah tertera di standar prosedur operasional yang ada, itu disebabkan oleh pegawai yang lalai dengan tanggung jawab sebagai petugas dikantor camat Tambang dalam menyelesaikan semua pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, terdapat pegawai yang berada diruangan ataupun dibagian pelayanan hanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak berbual sesama pegawai lainnya bahkan ada juga yang sibuk dengan telepon genggam ataupun sering disebutkan hp.

Pada saat jam kerja juga didapatin beberapa pegawai tidak berada di ruangan ataupun berada dikantor Camat tambang, ada yang berada dikantin kantor padahal itu masih dijam kerja belum waktunya untuk istirahat dan ada beberapa pegawai yang baru hadir dikantor Camat padahal keterlambatan hadir untuk pegawai dikantor Camat pada pukul 09.00 WIB akan tetapi masih ada yang baru hadir bahkan yang belum datang ke kantor lebih dari ketentuan yang ada. Jika dilihat dari absensi dikantor Camat masih menggunakan absensi manual yang mana hal tersebut membiasakan pegawai tidak disiplin dijam kerja yang sudah ditetapkan.

Berikut data jumlah fasilitas yang ada dikantor Camat tambang kabupaten Kampar:

Tabel 1.4 Data Jumlah fasilitas yang ada di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Komputer	3
2	Print	3
3	Kursi Ruang Tunggu	2 set
4	Lemari Arsip	3
5	Mesin ketik	1

Sumber data: Kantor Camat Tambang

Dari tabel jumlah fasilitas yang ada di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar menjadi salah satu penyebab terjadinya lamban pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam pengurusan dokumen atau surat menyurat lainnya. Karena dalam instansi harus memiliki fasilitas yang memadai karena hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut yang dapat menunjang berjalannya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jika fasilitas yang kurang memadai akan berdampak buruk bagi pelayanan di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar, contohnya saja banyak yang dialami masyarakat setempat dalam pengurusan mereka ke kantor camat mereka harus menunggu bahkan sampai sehari-hari harus bolak balik ke kantor camat seharusnya surat tersebut selesai dalam waktu 3 hari akan tetapi melebihi waktu yang sudah ada di standar operasional prosedur. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti banyak dijumpai jenis pengurusan pelayanan yang dilakukan masyarakat setempat pegawai harus menunggu terlebih dahulu jika computer masih dipakai oleh pegawai lain dengan kebutuhan atau kepentingannya masing-masing hal tersebutlah yang membuat lambannya pelayanan yang diterima.

Dari tabel jenis pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga jumlah fasilitas yang berada di kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance, UNDP mengemukakan sembilan prinsip adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Transparansi

Menekankan pada keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas informasi yang relevan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Responsif
Kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan yang dilayani.
4. Akuntabilitas
Menekankan pada tanggung jawab dan kewajiban suatu entitas atau individu untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta transparansi dalam pelaksanaannya.
5. Efektivitas dan Efisiensi
Penting dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu organisasi atau entitas mencapai tujuan secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.
6. Aturan Hukum (Rule of law)
Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
7. Berorientasi Consensus
adanya perantara antara berbagai kepentingan untuk memperoleh pilihan yang bagi masing-masing kepentingan mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Equity (Berkeadilan)

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya.

9. Visi Strategis

Pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas dan jangka panjang terhadap *good governance* dan Pembangunan manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan tersebut. dibutuhkan untuk memberikan arahan akan dibawa ke mana sebuah organisasi ke depannya. Ini kemudian menentukan langkah-langkah program yang harus diambil agar dapat sampai pada cita-cita organisasi.

Tugas dan tanggung jawab kecamatan dalam menyelenggarakan urusan masyarakat desa dan kelurahan sekitarnya berarti melayani segala kebutuhan masyarakat. Namun kenyataannya di lapangan, dapat terlihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan yang maksimal dan belum optimal menerapkan *good governance*.

Sesuai dengan arahan Pj Bupati Kampar yang dimuat di *media center.kamparkab.go.id*, 2023 (informasi terkini seputar Kampar), ia menghimbau seluruh *stake holder* untuk meningkatkan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Guna meningkatkan kualitas pelayanan public di Kantor Camat Tambang, perlu dilakukan upaya nyata dalam penerapan prinsip *good governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar*”

1.1 Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi prinsip *Good Governance* di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor penghambat apa saja dalam Implementasi prinsip *Good Governance* di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan penelitian

Berikut tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi prinsip *good governance* di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparatur pemerintahan Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat melalui prinsip *good governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan kontribusi terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan (politik).

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan serupa di masa yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Penulis membagi ke enam bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, umusan masalah, tujuan penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat pengertian, konsep, teori, dan referensi yang bersumber dari buku, resensi, jurnal, publikasi, pandangan islam, kajian terdahulu, defenisi konsep, indikator dan sub indicator, serta kerangka teori.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sample, serta metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fakta dan informasi dengan metode yang telah diberikan, menjelaskan hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Implementasi

Terdapat perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian atau definisi dan implementasi. Hal ini perlu diperjelas lebih lanjut untuk mempersatukan pengertian implementasi dengan kajian kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasinya akan dilakukan setelah perencanaan sudah matang atau proyek selesai.

Harsono, 2002:67 (Tahir,2022) menyatakan implementasi adalah proses pengambilan tindakan atau inisiatif kebijakan mulai dari kebijakan hingga administrasi, pengembangan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelesaian program. Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan interaksi antara tujuan dan kegiatan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, Perwujudan ini dapat diartikan sebagai penerapan atau implementasi.

Menurut Mulyad (2015:12), Implementasi berarti tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengubah keputusan tersebut menjadi model tindakan dan untuk mencapai perubahan besar atau kecil dibandingkan dengan yang telah diputuskan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencoba memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan.

Dari pernyataan Grindle (1980: 7) dalam Besar, 2010 bahwa implementasi adalah proses administrasi umum yang dapat dipelajari pada tataran program tertentu. Proses implementasi dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program tindakan telah diorganisir dan sumber daya telah disiapkan serta dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Definisi diatas menunjukkan bahwa kata implementasi tersebut mengarah pada operasi, tindakan, atau mekanisme sistem.

2.2 Good Governance

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun pemahaman mereka tentang *Good Governance* berbeda-beda, sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa dengan *Good Governance* akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak dari mereka membayangkan bahwa dengan *Good Governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan public akan meningkat, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah akan lebih mementingkan kepentingan warga negara (Dwiyanto, 2005).

Menurut Osborn dan Gaebler (dalam Abidarin Rosidi, dkk, 2013:2) mengartikan governance sebagai suatu proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama-sama dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut definisi menurut World Bank, *Good Governance* adalah konsep penerapan manajemen pembangunan yang stabil dan bertanggung jawab secara harmonis dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari malsitribusi dan kekurangan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menegakkan disiplin fiskal serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan bisnis. *Good Governance* bertujuan untuk memperkuat “kerangka kelembagaan tata kelola”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah fokus pada tata kelola yang baik berdasarkan tujuan yang sepakati sesuai undang-undang yang berlaku.

Lembaga Administrasi Negara (Sedarmayanti, 2012:3) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah terselenggaranya administrasi publik yang sehat dan bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan tetap menjaga “sinergi” interaksi konstruktif antara negara dan swasta, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000 (Sedarmayanti 2012:4), good governance diartikan sebagai pemerintahan yang mengamalkan dan melaksanakan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektifitas, serta supremasi hukum. dan dapat diterima oleh masyarakat. Tata kepemerintahan yang baik merupakan prinsip demokrasi, partisipasi dan kemasyarakatan yang harus ditetapkan dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Rahman (2018:23) konsep good governance dimaksudkan sebagai suatu mekanisme atau proses yang digunakan untuk mengatur hubungan antara birokrasi dan Lembaga non-pemerintah termasuk masyarakatnya. Agar bergerak kearah yang lebih baik partisipasi pemangku kepentingan dalam birokrasi sangat penting karena pemangku kepentingan mempunyai kemampuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat juga harus ikut terlibat dalam mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) (Sedarmayanti 2012:5), ciri-ciri atau prinsip yang perlu dikembangkan sebagai acuan penerapan good governance adalah:

1. Partisipasi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan melalui lembaga hukum.
2. Rule of Law, setiap negara harus memiliki kerangka hukum yang adil dan tidak memihak, khususnya perundang-undangan hak azasi manusia.
3. Transparansi, adanya keterbukaan kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi dibutuhkan masyarakat butuhkan yang dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
4. Responsif, Lembaga harus berusaha untuk melayani seluruh pemangku kepentingan.
5. Berorientasi Consensus, adanya perantara antara berbagai kepentingan untuk memperoleh pilihan yang bagi masing-masing kepentingan mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Keadilan (Equity), setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya.
7. Efisiensi dan efektifitas, setiap lembaga menghasilkan sesuatu sesuai kebutuhan, dengan menggunakan sumber daya yang sebaik-baiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Akuntabilitas, pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan Masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan.
9. Visi Strategis, pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas dan jangka panjang terhadap *good governance* dan Pembangunan manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan tersebut.

Seluruh ciri-ciri atau prinsip-prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan berkaitan serta tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, jika implementasi *good governance* atau yang biasa dikenal dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam organisasi negara dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya akan memudahkan terselenggaranya kegiatan disegala sektor.

2.3 Pandangan Islam Terhadap *Good Governance*

Dalam memahami *good governance* dari sudut pandang syariah, terdapat sebuah konsep *khalifah* (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa seorang pemimpin pemerintah harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Orang yang melaksanakan tugas-tugas *khalifah* disebut *khalifah*, artinya orang yang menggantikan (jabatan) sebelumnya, orang yang menggantikan kedudukan orang lain, dan seorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan.

Melihat konsep *good governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dalam tema yang dipakai dalam literatur islam. Nabi SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi SAW yang sangat populer adalah: ciri-ciri orang munafik itu tergolong atas tiga: apabila berbicara selalu penuh, apabila berbanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Ada lima contoh kepemimpinan yang sudah ada pada zaman Nabi SAW adalah: Shidiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai memberikan pedoman bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik setidaknya mempunyai tiga pilar yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu (1) tata cara pengangkatan mereka sebagai penerus Nabi Saw dalam kepemimpinan umat islam (2) wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada penerus Nabi Saw. Merupakan konsep kepemimpinan islam yang menggambarkan sistem pemerintahan yang dekat dengan Nabi, meskipun sudah muncul nilai-nilai demokrasi.

Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat al-qur'an dan sunnah Nabi Saw mengenai Good Governance atau pemerintahan baik.

Qs An-Nisa Ayat 58

إِنَّ ۤ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تَوَدُّوْا أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهٖ يَعْظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Q. S Al-Ma'idah Ayat 8

عَلَى قَوْمٍ شَدَّانُ يَجْرِمُكُمْ وَلَا بِالْقَسْطِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلذَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا أَلَا

Terjemahannya: “wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang senantiasa membela (kebenaran) atas nama Allah, jadilah saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Q. S Al-Naml Ayat 33

۳۳ تَأْمُرِينَ مَاذَا فَنَنْظُرِي إِلَيْكَ وَالْأَمْرُ شَدِيدٌ بِأَسِّ وَأُولُوا قُوَّةً أُولُوا نَحْنُ قَالُوا

Terjemahannya: “Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.

Q. S Al- Baqarah Ayat 30

الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ قَالُوا ۖ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِيَّيَ لِلْمَلَكَةِ رَبِّكَ قَالَ إِنْ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِيَّيَ قَالَ ۖ لَكَ وَتَقَدَّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ

Terjemahannya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Qs. Al-Baqarah: 30.

Dikutip dari buku Shahih Bukhari Muslim karya Muhamad Fu'ad Abdul,

hadist tentang pemimpin:

Rasulullah SAW bersabda, "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raknyanya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari).

2.4 Pelayanan Publik

Menurut Batinggi (Muslim & Hadi, 2017), pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemerintah atau kegiatan mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat atau masyarakat umum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik yang merupakan hak setiap warga negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk yang timbul karena undang-undang mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan public merupakan kepercayaan publik. Masyarakat berharap pelayanan publik dapat memperoleh secara jujur dan mengelola sumber pendapatan secara baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang jujur dan bertanggung jawab menciptakan kepercayaan warga negara sebagai penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Menurut Kurniawan (2005:4), pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) menurut aturan-aturan dasar dan prosedu-prosedur yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan mengenai kebutuhan Masyarakat atau Masyarakat yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut.

2.5 Kedisiplinan

Definisi disiplin menurut Amri (dalam Sovia, 2017) sebagai kesadaran seseorang akan kepatuhannya terhadap aturan mengikat yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Menurut Asriani, dkk (2015) disiplin didefinisikan sebagai tolak ukur tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan kewajiban atau tugas yang diamanahkan kepadanya. Disiplin dapat mendukung keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan mendorong antusiasme dan semangat kerja pegawainya. Dapat ditarik simpulannya bahwa disiplin merupakan cerminan pertanggungjawaban atau akuntabilitas seseorang terhadap kewajiban atau amanah yang melekat pada dirinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan.

Siagian (2009, dikutip dalam Azwar, 2016) membagi disiplin menjadi 2 jenis yakni disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif ialah reaksi yang mendorong pegawai untuk patuh dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan organisasi. Sedangkan pengertian disiplin korektif ialah salah satu bentuk respon terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pegawai. Dharma (2003, dikutip dalam Ramli, 2019) menyatakan bahwa kehadiran pegawai setiap hari, ketepatan dalam jam kerja, mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal, serta ketaatan pada peraturan merupakan indikator yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai.

Disiplin kerja pada hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, di mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun non formal, serta motivasi yang ada pada setiap karyawan harus dikembangkan dengan baik. Dengan demikian semakin tingginya disiplin kerja setiap karyawan yang didukung oleh keahlian, upah, atau gaji yang layak, maka akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dari instansi itu sendiri.

Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang di tetapkan. Dan dengan adanya ketegasan pula maka pegawai akan lebih besar tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas kewajibannya. Dengan adanya tanggung jawab yang tinggi akan menciptakan suatu organisasi lebih terarah dalam pencapaian hasil dari pegawai. Dan selain itu, membuat suatu organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan rujukan dalam tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan pembandingan dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Arif cahyadi (2016)	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis <i>Good Governance</i> Di	aspek penerapan <i>good governance</i> terhadap imensi kualitas pelayanan public belum merasakan	Lokasi dan waktu penelitian. Lingkup penelitian hanya sebatas pelayanan dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1		Kecamatan Sukolilo Surabaya)	kepuasan yang sangat baik hanya orang yang merasa baik.	pembuatan e-KTP
2	Hidayat dkk (2023)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun memiliki beberapa catatan. Catatan tersebut dalam hal transparansi dan partisipasi.	Lokasi dan waktu penelitian.
3	Safrijal dkk (2016)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	hasil penelitian dapat di Simpulkan penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> di Kecamatan Kluet Utara belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip <i>Good Governance, Good</i>	Lokasi dan waktu penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<i>Governance</i> baru diterapkan semenjak pertengahan 2015.	
4	Yuliono (2019)	Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam Meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik	Terlaksananya implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam meningkatnya kinerja organisasi pelayanan publik, namun ditemukan kendala seperti adanya beberapa pegawai yang belum mengerti prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	Lokasi dan waktu penelitian
5	Sri Roserdevi Nasution (2018)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru	Penerapan <i>good governance</i> dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Sail belum maksima	Lokasi dan waktu penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan Batasan kajian yang menjadi bahan utama pada bagian berikut ini, yang bertujuan untuk memberi arahan pada penulisan bagian berikut, yakni mendefenisikannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk menurut aturan yang ditentukan oleh undang-undang atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Sedarmayanti 2012:4) mengartikan *good governance* adalah pemerintahan yang menyelenggarakan dan melaksanakan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat. Tata pemerintahan yang baik merupakan prinsip demokrasi, partisipasi, dan masyarakat yang harus ditetapkan dalam segala bidang kehidupan.

Konsep Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Good Governance	1. Partisipasi	Mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka
	2. Transparansi	Menekankan pada keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas informasi yang relevan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan
	3. Responsif	Kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan yang dilayani.
	4 Efektivitas dan Efisiensi	Penting dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu organisasi atau entitas mencapai tujuan secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.
	5. Akuntabilitas	Menekankan pada tanggung jawab dan kewajiban suatu entitas atau individu untuk bertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta transparansi dalam pelaksanaannya.
6. Aturan Hukum (Rule of law)	setiap negara harus memiliki kerangka hukum yang adil dan tidak memihak, khususnya perundang-undangan hak azasi manusia.
7. Berorientasi Consensus	adanya perantara antara berbagai kepentingan untuk memperoleh pilihan yang bagi masing-masing kepentingan mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
8. Equity (Berkeadilan)	setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya.
9. Visi Strategis	pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas dan jangka panjang terhadap <i>good governance</i> dan Pembangunan manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan tersebut.

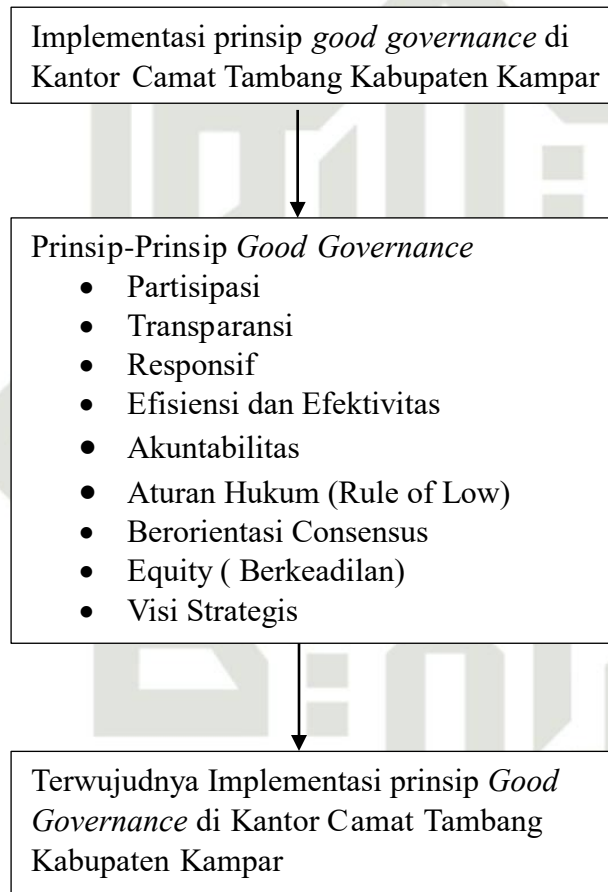
Menurut United Nations Development Program (UNDP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk memberikan gambaran atau Batasan tentang teori yang digunakan untuk memahami penelitian yang dilakukan. Biasanya berbentuk diagram untkememudahkan pemahaman tentang prosedur dan proses yang terlibat dalam penelitian tersebut.



Menurut United Nations Development Program (UNDP)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar karena dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa data penelitian yang sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti dan pemilihan lokasi di Jln. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. dan penelitian dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2016:11), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedua variabel independent. Oleh karena itu, metode penelitian ini mencakup gambaran langsung tentang fenomena atau masalah yang terjadi pada objek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif. Menurut Sugiono (2016:14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Menurut Sugiono (2016:156), Sumber informasi yang diperlukan peneliti adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Menurut Sugiono (2016:156), data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sumber utama penelitian, yaitu informasi yang didapatkan dari observasi, dan wawancara yang telah ditentukan. Dalam penelitian informasi diperoleh dari Camat, Sekretaris camat, dan Staff Pegawai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2016:156) data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui perantara instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan penelitian atau sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada yang memperoleh data, biasanya melalui orang lain atau melalui dokumen seperti buku, artikel, laporan, dan arsip resmi serta literatur relevan lainnya untuk melengkapi informasi dasar.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Menurut Irawan (2004:64) observasi adalah penelitian yang pengumpulan datanya didasarkan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mempelajari penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Wawancara

Menurut Sugiono (2009 :72) wawancara adalah pertemuan antara dua orang, dimana terjadi pertukaran informasi dan pemikiran melalui tanya jawab, sehingga mengembangkan makna atas suatu topik tertentu. wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pegawai, staf atau pun Masyarakat yang sedang berkunjung di kantor camat tambang. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber (key informan) dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Ponsel, buku dan pena digunakan sebagai alat dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013:274), dokumentasi adalah pencarian dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar ataupun buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang-orang yang diminta keterangan mengenai fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2013:145), subjek penelitian adalah subjek yang dimaksud untuk diselidiki oleh peneliti. Oleh karena itu, subjek penelitian adalah sumber informasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari untuk mengungkap fakta di suatu lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka definisi subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara jelas dan menyeluruh.

Penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan melalui *purposive sampling* (Sugiono,2016:96) yaitu melalui teknik pengambilan sampel berdasarkan beberapa aspek, dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah mereka yang benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Insidental Sampling (Sugiono,2016:96) yaitu suatu teknik dimana sampel ditentukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel. Dalam hal ini karena banyaknya orang maka peneliti menggunakan teknik Insidental Sampling dan menugaskan informan berdasarkan kebetulan dan sesuai dengan kriteria penelitian ini untuk memperdalam dan memperjelas informasi mengenai permasalahan penelitian ini.

Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Daftar Key Informan dan Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kasi Kessos	1
2	Staf Kessos	1
3	Kasubag Keuangan	1
4	Kasi Kepegawaian	1

5.	Pegawai	3
6.	Masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	7
Jumlah		14

3.6 Teknik Analisi Data

Menurut Sugiono (2009:244) analisa data adalah suatu proses diperoleh informasi yang di peroleh wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya dicari dan disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan dikomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, Dimana dengan mereduksi atau menyederhanakan data maka dibuat gambaran, penyajian data disajikan dan ditarik kesimpulan.

Namun penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir peneliti terus-menerus menganalisis data baik selama maupun setelah pengumpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diambil secara induktif, dimana peneliti memulai dari kasus-kasus individual berdasarkan pengalaman nyata kemudian merumuskannya menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian megembangkan suatu teori dari data tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kecamatan

Kecamatan Tambang berdiri pada tahun 1980 dan mewakili Kecamatan Tambang hasil pemekaran Kabupaten Kampar dan baru diendapkan pada tahun 1995. Kantor pusat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terletak di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Tambang, Kabupaten Kampar. Kawasan Tambang pada umumnya merupakan Kawasan datar/luas yang dilintasi Sungai Kampar dan beberapa Sungai Kecil lainnya.

Pejabat pertama dari Tahun 1990 hingga 1998 adalah Kamaruzaman R.BA. Kemudian pada tahun 1998-1999 dijabat oleh Dr. Afrizal Abra, kemudian pada Tahun 1999-2000 oleh Dr. Syafrudin Masri, kemudian pada tahun 2000-2001 oleh Nusyamsih Shaleh. Kemudian Dr digantikan. Afrizal Abra pada tahun 2001 hingga 2004, disusul oleh Dr. Ranayus pada Tahun 2004-2005, kemudian pada Tahun 2005 -2007 di jabat oleh Edy Pratono, kemudian pada Tahun 2007-2011 dijabat oleh Dr.H. Asmansyah dan kemudian untuk sementara Dr. Jamilus pada bulan November 2011 hingga Januari 2012. Setelah itu, pada bulan Januari 2012 hingga Februari 2015, Rakhmat S.Sos menjadi pengelola wilayah Tambang pada bulan Februari 2015 hinnga Januari 2017. Pengurus wilayah kabupaten Kampar adalah H. Mulatua, S.Sos, M.Si. dari Januari 2017 sampai bulan Mei 2017, Camat Tambang di Jabat oleh Irianto, S.IP pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 menggantikan Al Kautsar,S.STP , pada tahun 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai 2022 dijabat oleh Drs. Abukari, M.Pd, dan saat ini Camat Tambang di jabat oleh Drs. Jamilus.

Kecamatan Tambang terdiri dari 17 desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Seluruh desa tersebut telah berstatus hukum definitif dan termasuk desa dalam klasifikasi swadaya atau desa mandiri. Batas-batas Kecamatan Tambang antara lain:

1. Perbatasan Utara dengan Kabupaten Tapung.
2. Bagian Selatan dibatasi wilayah Siak Hulu, Perhentian Raja dan Kampar Kiri Hilir.
3. Bagian baratnya terbatas pada Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kodya Tampan Pekanbaru.

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 yaitu:

1. Pemekaran Sebagian kecamatan Kampar sebagian wilayah menjadi Kecamatan Tambang.
2. Perluasan Sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi Kecamatan Tapung. Dengan demikian, setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa.

Tabel 4.1 Daftar nama dan jumlah kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	XIII Koto Kampar	12 Desa
2	Bangkinang	7 Desa
3	Bangkinang Kota	2 Desa
4	Gunung Sahilan	9 Desa
5	Kampa	9 Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kampar	17 Desa
7	Kampar Kiri	19 Desa
8	Kampar Hilir	7 Desa
9	Kampar Kiri Hulu	24 Desa
10	Kampar Kiri Tengah	11 Desa
11	Kampar Utara	8 Desa
12	Koto Kampar Hulu	6 Desa
13	Kuok	9 Desa
14	Perhentian Raja	5 Desa
15	Rumbio Jaya	7 Desa
16	Salo	6 Desa
17	Siak Hulu	12 Desa
18	Tambang	17 Desa
19	Tapung	25 Desa
20	Tapung Hilir	16 Desa
21	Tapung Hilir	14 Desa

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kecamatan Tambang adalah salah satu pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan luas wilayah $\pm 489,91 \text{ km}^2$ atau $\pm 53.298,00 \text{ Ha}$. Tidak ada yang berbatasan dengan laut, namun terdapat beberapa batas alam dengan kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 desa di Kecamatan Tambang melintasi Sungai Kampar, salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar.



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Tambang



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun desa – desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tambang yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Daftar nama dan jumlah Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	Nama Desa
1	Kuapan
2	Aursati
3	Tambang
4	Padang Luas
5	Gobah
6	Terantang
7	Rimbo Panjang
8	Kualu
9	Teluk Kenidai
10	Kemang Indah
11	Parit Indah
12	Sungai Pinang
13	Kualu Nenas
14	Tarai Bangun
15	Palung Raya
16	Pulau Permai
17	Balam Jaya

Sumber data: Kantor Camat Tambang

4. Visi dan Misi Kecamatan Tambang

1. Visi

Menjadikan Kecamatan Tambang sebagai Kecamatan yang terdepan di Kabupaten Kampar yang aman dan tanggap terhadap bencana serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi
 - a. Persiapan staf profesional.
 - b. Mengaktifkan sistem dan sistem keamanan di setiap desa.
 - c. Memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
 - d. Untuk meningkatkan disiplin kerja pada pegawai Seperti yang terlihat di atas, Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Seluruh Desa tersebut telah berstatus hukum definitif dan termasuk desa dalam klasifikasi desa swadaya.

4.3 Kedudukan dan Fungsi Kecamatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan kepengurusan sesuai struktur organisasi unit kerja Camat Tambang dengan mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan maka dibuat uraian tugas seperti berikut ini.

1. Camat

Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kampar untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
1. Melakukan tugas lain yang dipertahankan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan Operasional, Mengelolah, Mengoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud adalah :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
- g. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP, PENJA, IKUT dan segala bentuk pelaporan lainnya
- h. Merumuskan program dan kegiatan lingkungan sekretariat
- i. Menyelenggarakan Administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisis dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketata usahaan pada Kecamatan
- l. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan
- m. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- o. Memberikansaran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat.
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian.
- c. Membantu Sekretaris melaksanakan Pengelolaan Penyusunan Administrasi program / Perencanaan.
- d. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan LPPD, LKPJ, LKJIP, PENJA, IKUT, RENJA, RENSTRA dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Mengumpulkan, Mengelola, Menganalisa data sebagai bahan acuan dalam Penyusunan Program Kerja.

f. Menganalisa Kebutuhan, Melaksanakan Pengadaan, Memelihara, mendayagunakan serta Mendistribusikan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kecamatan agar Efektif dan Efisien.

g. Mengatur Administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku.

h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing seksi dan melakukan pengurusan Administrasi Kepegawaian personil lingkup Kecamatan.

i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup kecamatan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja kasubbag sesuai dengan rencana kerja sekretariat.
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kasubbag.
- c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing- masing seksi.
- d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap seksi.
- e. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
- f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- g. Menyiapkan SPM lingkup Kecamatan.
- h. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran kecamatan.

Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan.

k. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup kecamatan.

l. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengasawa.

m. Melaksanakan administrasi aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasikan permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.

o. Memberikan saran dan mempertimbangkan teknis kepada atasan.

p. Membagi tugas membagi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan.

r. Melaksanakan tugas kedinasana lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan



Ketentraman dan Ketertiban Umum. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menghimpun dan Menyusun Rencana Kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan seksi – seksi.
- c. Melaksanakan fasilitas pelaksanaan pemilihan umum
- d. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintahan Desa, meliputi:
 1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap tertib administrasi pemerintahan desa
 2. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan perangkat desa
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan desa dalam satu wilayah kecamatan
 5. Menyiapkan bahan rangka musyawarah desa.
 6. Menyiapkan bahan dalam rangka usulan pemekaran, peningkatan, penyatuan atau penghapusan desa.
 7. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga masyarakat.
 8. Menyiapkan bahan dalam rangak kerjasama antar desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas- batas wilayah. Melaksanakan fasilitas administrasi kependudukan dan fasilitas instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi emigrasi, imigrasi.

Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum sesuai dengan kewenangannya.

Melaksanakan kegiatan keagrarian di kecamatan meliputi :

1. Pembantuan pendataan tanah.
2. Pemeliharaan data pertahanan.

Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.

h. Melaksanakan legalisasi administrasi pertahana meliputi :

1. Surat Keterangan Waris.
2. Surat Kuasa Waris.
3. Permohonan Ukur Tanah.
4. surat pelepasan Hak atas tanah.
5. Surat Persetujuan Pembagian Hak Bersama.

Mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik serta peyuluhan hukum.

Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta masyarakat

Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat

- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong parja dan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya
- m. Menegakan dan melaksanakan pearyuran daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- n. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- o. Monitoring dan pengasawan terhadap bangunan liar dan bangunan lainnya di wilayah kecamatan.
- p. Mengoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana.
- q. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.
- r. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peilihan Kepala Desa dan pemilihan Anggota BPD.
- s. Melakukan pengawasan dan pemamtauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
- t. Membantu camat dalam pegawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap Izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku.
- u. Memproses rekomendasi terhadap penertipan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

w. Mengavaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahan.

x. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

y. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengavaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan.

6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat Kasi pemberdayaan masyarakat melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm).
- d. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
- f. Memfasilitasi pengembangan perekonomian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintahan kepala Desa.

h. Melakukan usulan anggaran yang diajukan oleh desa.

i. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa.

j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat.

k. Melaksanak tugas lain yang diberikan oleh atasan tugas dan fungsinya.

7. Kasi Ketentraman dan Ketertuban (Trantib)

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan dan membina ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan.
- d. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Membina kegiatan Pos Siskamling.
- f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya.
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan.
- j. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
- m. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS)

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Ada beberapa fungsi tugas sosial Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi kesejahteraan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama antar umat beragama.
- c. Membina kegiatan Badan Amal Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- d. Membantu Pembinaan Keluarga Berencana.
- e. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari nasional.
- f. Melakukan pembinaan generasi muda dan wanitaan.
- g. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial organisasi keagamaan.
- h. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalangunaan narkoba dan masalah sosial lainnya.
 - i. Meneliti dan melegalisasikan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - j. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu.
 - k. Membantu pembinaan PKK.
 - l. Melaksanakan pembinaan terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - m. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam bidang kebersihan.
 - n. Melakukan pembinaan terhadap kebersihan di lingkungan masyarakat.
 - o. Merencanakan, melaksanakan, monitordan evaluasi bidang kebersihan di lingkungan masyarakat desa.
 - p. Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dengan budaya hidup bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

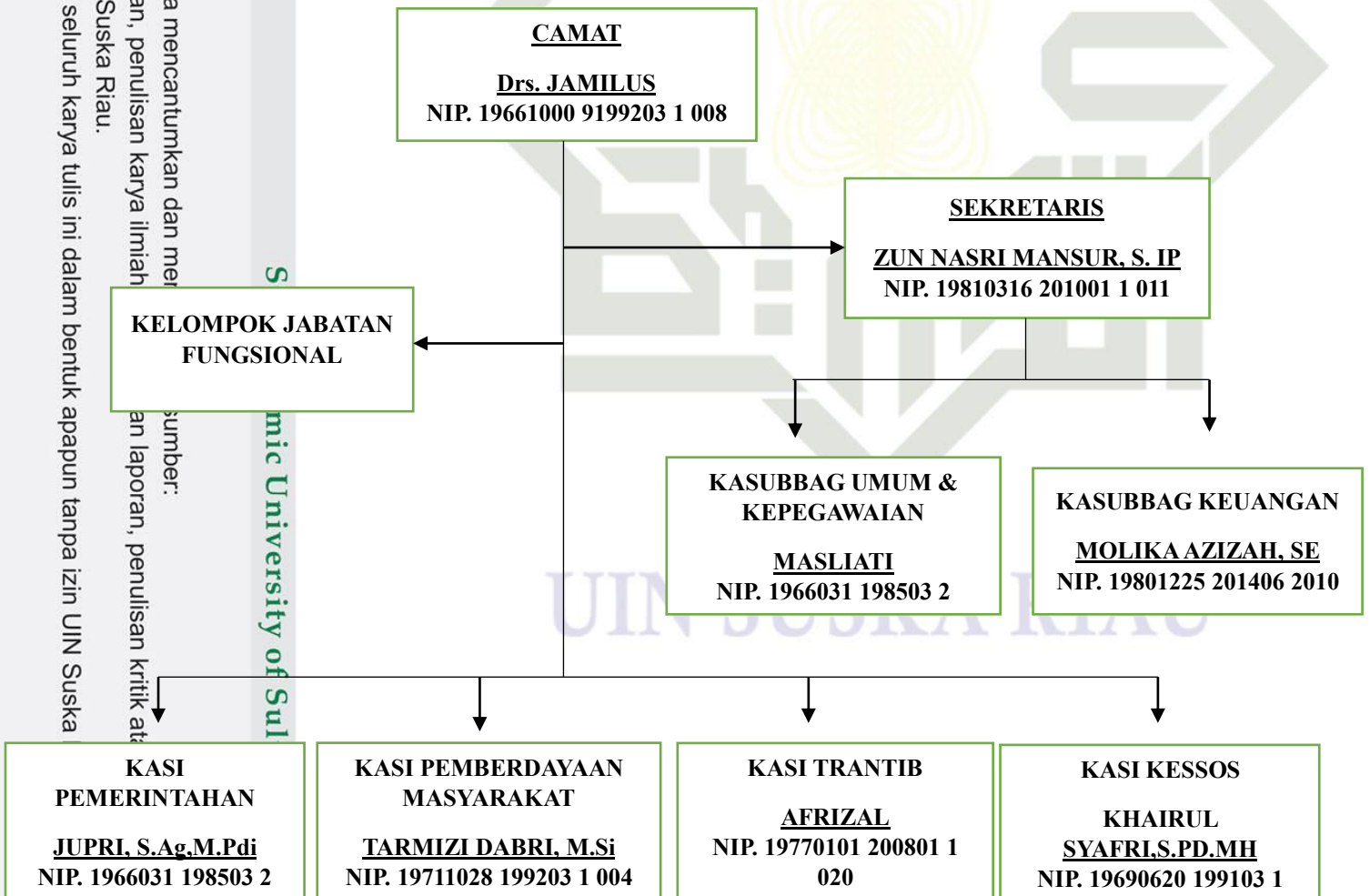
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan.

Mengkoordinasikan, pembinaan, dan pengawasan serta laporan langkah-langkah penanggulangan terdajinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Melaksanakan pengawasan dan pengolaan Keretiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kecamatan.

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sosial kesejahteraan sosial.

4.4 Struktur Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar





Daftar Nama Pegawai Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar

	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Dr. JAMILUS NIP.19661009.199203.1.008	PEMBINA TK 1 IV/B	Camat Tambang
2	Zu Nasri Mansur, S. IP NIP. 19810316 201001 1 011	PENATA TK 1 III/D	Sekretaris Camat Tambang
3	Khairul Syafri, S.Pd, MH NIP. 19690620 199103 1 004	PEMBINA IV/A	Kasi Kessos
4	Tamizi Dabri, M.Si NIP. 19711028 199203 1 004	PEMBINA IV/A	Kasi Pemberdayaan masyarakat
5	Jupri, S.Ag,M.Pdi NIP. 19680424 201001 1 001	PENATA TK 1 III/D	Kasi Pemerintahan
6	Syamsurizal, SE NIP. 19720513 199703 1 001	PENATA TK 1 III/C	Kasubag Keuangan
7	Masliati NIP. 19660301. 198503.2.001	PENATA III/C	Kasubag Umum Kepegawaian
8	Molika Azizah, SE NIP. 19801225 201406 2 010	PENATA MUDA TK 1 III/B	Kasubag Keuangan
9	Afrhardi NIP. 19590421.199401.1.001	PENATA MUDA TK 1 III/B	Staf Keuangan
10	Delfandri, ST NIP. 19731213 200003 1 003	PENATA MUDA TK 1 III/B	Staf Kasi Pemerintahan
11	Nurhaini NIP. 19670910.198603.2.001	PENATA MUDA TK 1 III/B	Staf Umum Kepegawaian
12	Putri Armelisa September Rini,SE NIP. 19830907.201001.2.035	PENATA MUDA TK 1 III/B	Staf Kessos
13	Heri Kiswanto, S.Kom NIP. 19810901 201406 1 007	PENATA MUDA TK 1 III/B	Staf Umum Kepegawaian
14	Danas	PENGATUR TK 1	Staf Kessos

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau cara-cara lain untuk mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1	Dian Cipta NIP. 19730605 200701 2 033	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasi Trantib
1	Adri NIP. 19801005 200801 1 009	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasubag Keuangan
1	Indah Mulani Nasution NIP. 19770618.201001.1.011	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasi PM
1	Muzdalipa NIP. 19830609 20100 1 006	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasi PM
1	Muzdalipa NIP. 19820915 201001 1 019	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasi PM
19	Afrizal NIP. 19770101 201001 0 020	II/D PENGATUR TK 1	Staf Kasi Trantib
20	Luthfi Ramdhani NIP. 19780819 200801 1 010	II/B PENGATUR MUDA TK 1	Staf Trantib
21	Joni Herman, A.Ma NIP. 19740101 200801 1 016	II/C PENGATUR	Staf Trantib
22	Masdianto NIP. 19800412 201406 1 008	II/C PENGATUR	Staf Pemerintahan
23	Eka Futra NIP. 19761230 200906 1 001	II/C PENGATUR	Staf Pemerintahan
24	Paeman NIP. 19690205 200701 1 045	II/A PENGATUR MUDA	Staf Pemerintahan
25	Abdul Gapur	THL	Staf Umum Kepegawaian
26	Khairunas	THL	Staf Kessos
27	Yosi Anugrah Utami	THL	Staf PM
28	Weny Sartina, SE	THL	Staf Pemerintahan
29	Agus Hendrawan	THL	Staf Kasi PM
30	Rino Heriyanda	THL	Staf Keuangan
31	Ramaleni	THL	Staf Kasi Kessos
32	Wahyu Ramadana Fitrah	THL	Staf Pemerintahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menduplik sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) implementasi prinsip good governance dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar belum optimal atau belum maksimal terlaksana dikarenakan ada indikator prinsip good governance yang belum terpenuhi. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan belum optimalnya implementasi *good governance* antara lain: prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsive, prinsip efektivitas dan efesiensi. Hal ini disebabkan masih adanya pemberian pelayanan dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar yang tidak terselesaikan dengan baik sesuai dengan jumlah permintaan pelayanan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya respon dari pegawai camat memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, Masih kurangnya informasi yang tepat tentang prosedur pelayanan yang disajikan dikantor camat. Seperti kurangnya informasi untuk mekanisme pengurusan registrasi surat tanah. Sehingga banyak masyarakat yang tidak lengkap dalam persyaratan pelayanan yang diminta masyarakat, masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam hadir pada waktu jam kerja ataupun pada saat jam kerja, lalai dalam tugas dan kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi prinsip good governance di Kantor Camat Tmabng Kabupaten Kampar yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dilihat dari waktu pelayanan yang lambat, serta fasilitas teknologi informasi yang belum memadai seperti belum ada WIFI dan *finger print* (Absensi Otomatis). Implementasi prinsip good governance ini harus didorong dengan adanya pengembangan, pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pegawainya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip good governance.

1. Untuk sumber daya manusia perlu dilakukannya pelatihan dan pengembangan mengenai kedisiplinan dan juga tanggungjawab.
2. Diharapkan pelayanan terselesaikan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur).
3. Untuk fasilitas harus bisa mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi, untuk absensi pada zaman sekarang tidak bisa dilakukan secara manual, akan tetapi lebih baik menggunakan sidik jari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ## DAFTAR PUSTAKA
- Arifkunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Besar, G. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB. In *Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Cahyadi, A. (2016). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Oktober*, 2(2), 479–494.
- Dharmang, L., (2013). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO*. 1(3), 1080–1088.
- Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Ferlinda, E. D., Ribawanto, H., & Siswidiwanto. (n.d.). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 22-30, 1, 22–30.
- Herdiana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi Jl Raya Cibeber No, D., Selatan, C., & Cimahi, K. (n.d.). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar Abstrak*.
- Hidayat, E., Pramono, T., Fachruddin, I., & Artha Prissando, F. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 29–40. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.139>
- Kecamatan, D., Kota, W., Oleh, M., Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (n.d.). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*.
- Muslim dan Hadi Larbiel. 2017. *Pelayanan Publik*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Nasution, S. R. (2018a). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SAIL KOTA PEKANBARU*. 10(2), 72–77.
- Gitman, C. W. (2005). *The Ethics Challenge in PublikService A Problem Solving Market Street*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. 10 Nopember 2000.
- Rachman, A. A. (2010). *Good Governance dalam Perspektif Islam*
- Roth, G. J. (1926). *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*.
- Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Safrijal, Nasir Basyah, M., & Ali, H. (2016). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* (Vol. 1, Issue 1).
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*" (2 ed.). Mandar Maju. Bandung, Jawa Barat, Indonesia
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, T. (n.d.). *PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI FORMAT REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.
- Sutmasa, Y. G. (n.d.). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. In *JURNAL CAKRAWARTI*.
- Tahir, S. (2022). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL* (Vol. 2, Issue 2).
- Tisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (n.d.). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. (2009).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR CAMAT
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

**Informan Penelitian : 1. Pegawai Kantor Camat (7 Informan)
2. Masyarakat (7 Informan)**

Tempat Penelitian : Kantor Camat Tambang

Pedoman wawancara dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”. Adapun pertanyaan untuk mengetahui prinsip-prinsip good governance diukur menggunakan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan Untuk Pegawai
 - a) Prinsip Transparansi
 - 1) Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam tata kelola pemerintah Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar?
 - 2) Adakah informasi untuk dipublikasikan kepada publik? Apa saja informasi tersebut?
 - 3) Bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik?
 - 4) Apa saja sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik?
 - b) Prinsip Akuntabilitas
 - 1) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan anggaran oleh pemerintah Kantor Camat Tambang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kantor Camat Tambang?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kantor Camat Tambang?

c) Prinsip Partisipasi

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah Kantor Camat?
- 2) Bagaimana intensitas atau seberapa banyak masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan Kantor Camat Tambang?
- 3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memonitor atau mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kantor Camat Tambang?

d) Prinsip Aturan Hukum (Rule of law)

- 1) Bagaimana prinsip aturan hukum ditetapkan dalam tata kelola pemerintah Kantor Camat Tambang?
- 2) Apakah penyelenggaraan tata kelola pemerintah Kantor Camat Tambang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?
- 3) Bagaimana kualitas penegakan hukum dalam tata kelola pemerintahan Kantor Camat Tambang?

e) Prinsip Responsif

- 1) Bagaimana daya tanggap pemerintah Kantor Camat Tambang dalam merespon kebutuhan masyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana ketersediaan dan kejelasan dan prosedur pengaduan terhadap pelayanan pemerintah kantor Camat Tambang?
- 3) Bagaimana kecepatan dan ketepatan pemerintah kantor Camat Tambang dalam menggapi pengaduan?

f) Prinsip Keadilan (Equity)

- 1) Apakah masyarakat diwilayah Kantor Camat Tambang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan?
- 2) Apakah ada jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan dan pemberdayaan?
- 3) Bagaimana kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dari pemerintah Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar

g) Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

- 1) Apakah pemberian pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sudah tepat sasaran?
- 2) Apakah jalannya pemerintahan Kantor Camat sudah mencapai target?

h) Prinsip Berorientasi Consensus

- 1) Mengapa berorientasi konsensus dianggap penting dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan masyarakat di kantor camat?



- 2) Bagaimana mengelola situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di antara staf atau departemen yang berbeda dalam mencapai keputusan yang disepakati?

Prinsip Visi Strategis

- 1) Bagaimana upaya untuk mewujudkan Visi Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
- 2) Apakah Kebijakan yang sudah dibuat sudah konsisten untuk mewujudkan visi tersebut?

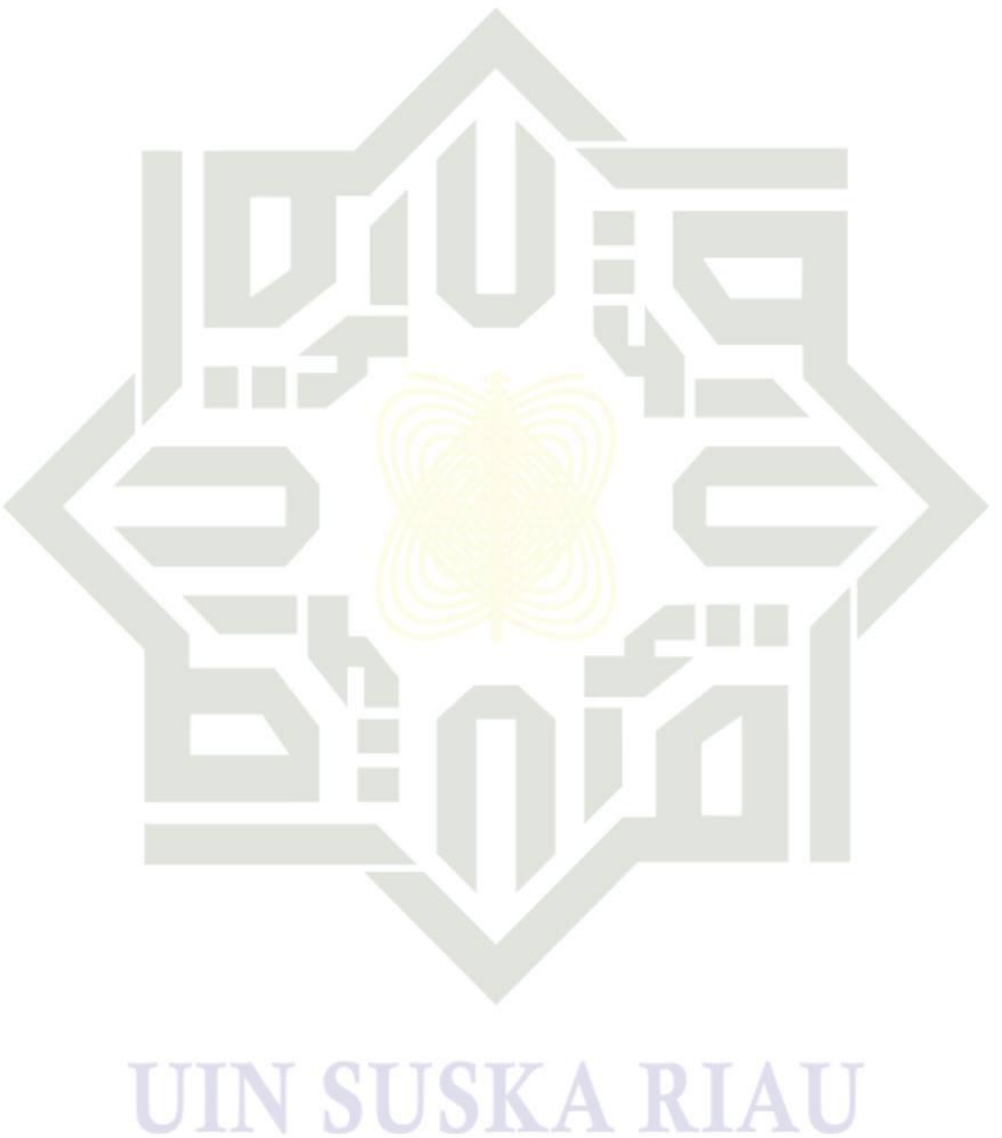
2. Pertanyaan Untuk Masyarakat

- A. Dalam pengurusan administratif dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana respon pegawai yang berada dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar?
- B. Menurut anda bagaimana pelayanan yang anda terima sebagai pemangku kepentingan dalam pengurusan dokumen ataupun berkas lainnya?
- C. Bagaimana kecepatan pegawai dalam merespon atau memberikan pelayanan kepada masyarakat?
- D. Mengenai kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari pegawai kantor camat, Apakah anda merasa puas atas pelayanan yang sudah diterima? Dan bagaimana pemerintah merespon masukan ataupun keluhan masyarakat terkait layanan publik?
- E. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan? Bagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah setempat memastikan bahwa kebijakan dan Keputusan publik diakses secara terbuka oleh masyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar



© Hak cipta

Kasim Riau

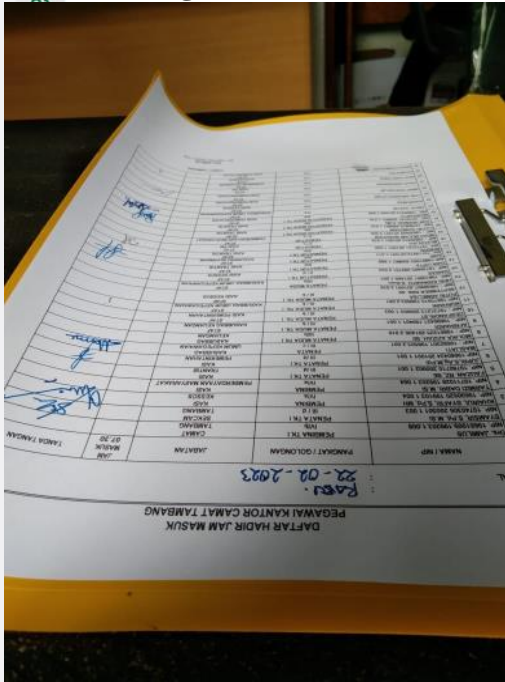
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Absen Pegawai (Manual)



DAFTAR HADIR APEL SEMING
PEGAJAWI KANTOR CAMAT TAMBANG

22-02-2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. JAMIL US	PERUSAHA TET	CAMAT	
2	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	TN	TAMBAK	
3	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	KECAMAT	
4	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	TAMBAK	
5	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
6	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
7	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
8	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
9	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
10	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
11	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
12	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
13	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
14	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
15	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
16	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
17	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
18	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
19	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
20	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
21	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
22	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
23	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
24	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
25	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
26	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
27	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
28	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
29	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
30	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
31	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
32	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
33	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
34	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
35	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
36	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
37	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
38	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
39	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
40	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
41	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
42	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
43	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
44	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
45	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
46	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
47	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
48	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
49	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	
50	DR. HENDRI HENDRI S. S.P	PERUSAHA TET	PERUSAHA	

DR. JAMIL US
NIP. 1963081019801001

2. Wawancara Dengan Staf Kassi Keuangan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara Dengan Staf Umum dan Kepegawaiaan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Wawancara dengan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dengan Pegawai PLN (Masyarakat)



6. Wawancara dengan Masyarakat



7. Wawancara Bersama Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG
 Kode pos 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/Kessos/ 375

Kacamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : PATMA DWI JAYANTI
 N I M : 12070520695
 Universita : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : SI / VIII (Delapan)

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian /riset dan mengambil data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pinang, 24 April 2024
 An. Camat Tambang
 Kasi Kessos



KHAIRUL SYAFRI,SPd,M.Si
 NIP. 19690620 199103 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

2. Pelanggaran hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pelanggaran tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT: JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG KODE POS 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/310

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP/2024/195 tanggal 25 Maret 2024. Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

: **PATMA DWI JAYANTI**
 : **12070520695**
 : **UIN SUSKA RIAU**
 : **ADMINISTRASI NEGARA**
 : **S1**
 : **PEKANBARU**
 : **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

1. KANTOR CAMAT TAMBANG

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan di Sungai Pinang
 Pada tanggal 27 Maret 2024

CAMAT TAMBANG

Drs. JAMILUS

NIP : 19661009 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis, dan sebagainya, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil-hasilnya, baik dengan atau tanpa maksud untuk diperbanyak atau untuk publikasi.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Halal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-1721/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024

Pekanbaru, 20 Februari 2024 M

Biasa

10 Sya'ban 1445 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kantor Camat Tambang
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Patma Dwi Jayanti
NIM. : 12070520695
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang
Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2024/195

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-4146 Tanggal 19 Februari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **PATMA DWI JAYANTI**
NIM : 12070520695
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**
Lokasi : KANTOR CAMAT TAMBANG

ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Maret 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

- Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
- Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- Yang Berhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Sale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64146
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 0669/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

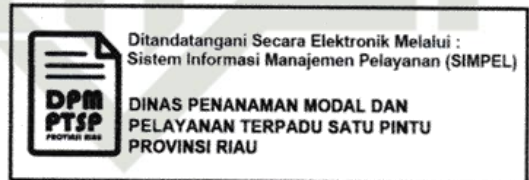
- 1. Nama : **PATMA DWI JAYANTI**
- 2. NIM / KTP : **12070520695**
- 3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT TAMBANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: B-1663/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024
 : Biasa
 : -
 : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 16 Februari 2024 M
 6 Sya'ban 1445 H

Kepada
 Yth. **Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Patma Dwi Jayanti
 NIM : 12070520695
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

B-7262/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 06 Desember 2023 M

Biasa

23 Jumadil Awwal 1445 H

Pra Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Patma Dwi Jayanti
NIM. : 12070520695
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
“**Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Cmat Tambang
Kabupaten Kampar**” Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni
Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Diilindungi Undang-Undang

Diilindungi Undang-Undang sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Patma Dwi Jayanti lahir pada tanggal 06 Agustus 2001. Di Tanjung Beringin, Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat. Putri dari Bapak Arpan Indra dan Ibu Nur'anismah, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Pada Tahun 2008 menempuh pendidikan dasar di SDN 181 Pekanbaru dan lulus tahun 2014.

Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMPN 40 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 02 Tambang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Mengambil jurusan ipa dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima menjadu mahasiswi pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui Jalur SNMPTN. Puji Syukur atas ridho Allah SWT, Serta do'a tulus dari orang tua dan keluarga, kerabat, serta bimbingan dari Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M. KP Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana di UIN Suska Riau dengan Judul Skripsi ***“Implementasi Prinsip Good Governance Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”***, dan dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasah pada tanggal 20 Juni 2024.